

ABSTRAK

Dalam masa otonomi daerah program Keluarga Berencana tidak selalu menjadi prioritas, pengendalian penduduk dan pembangunan serta peningkatan kualitas penduduk pemerintah daerah membentuk Badan Kependudukan dan keluarga Berencana. Penelitian ini bertujuan menganalisis “tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung program pembangunan kependudukan dan ketahanan keluarga”. Metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan triangulasi data terhadap petugas BKKBN, PLKB, kelompok masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana sudah berjalan dengan baik, dalam arti masyarakat ber KB sudah banyak yang melakukan konsultasi ke pusat pelayanan secara mandiri/swasta sudah mencapai 56% dari total pengguna Aseptor KB, 69% mayoritas dengan pilihan pil dan suntik. Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) sebagai program BKKBN yang dicanangkan secara Nasional dalam pembentukan Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) belum memenuhi target dikarenakan masyarakat masih banyak yang lebih memilih pil dan suntik, dari pada kesertaan KB melalui MKJP. Hal ini disebabkan faktor-faktor; (1) petugas medis; (2) tidak populernya KB MKJP pada kelompok etnik tertentu; (3) pemahaman tentang KB MKJP masih rendah; (4) biaya jasa pemasangan alat kontrasepsi KB MKJP; (5) Rendahnya pendidikan masyarakat (PUS) pernikahan dini di beberapa kelompok etnik tertentu; (6) kurangnya sarana dan belum optimalnya pelayanan KB.

Berdasarkan temuan penelitian, kendala-kendala yang dihadapi petugas KB di lapangan adalah: (1) jarak tempat tinggal petugas KB, (2) sarana dan prasarana pendukung program KB di setiap desa, (3) PUS masih memegang adat budaya daerah setempat tabu untuk ber-KB MKJP), (4) tingkat ekonomi prasejahtera (pra-KS).

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Kependudukan.